

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boediono, B, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo R. Santosa . 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Eresco.
- D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung : Sinar Baru
- H Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Gravidio, Jakarta.
- Josep Riwu Kaho, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Cetakan Ke-5, PT. Pos Indonesia. Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*. Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Andi.
- Moh. Zain dan Kustadi Arinta, 1984. *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Bandung.
- Munawir.1992. *Perpajakan*. Yogyakarta, Liberty.
- R Soemitro Brotodiharjo, 1995, *Ilmu Hukum Pajak*, Eresco Bandung
- Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rocmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung
- Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta, Pancar Suwuh.
- Suarta, 2004, *Perpajakan 1* Yogyakarta, AMTIS

The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Tjanya Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, 2001. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Internet

"Pertambahan Sepeda Motor di DIY 11 Persen per Tahun" dalam <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 11 Januari 2010.

"Sekitar 00 Persen PAD DIY dari Pajak Tarifnya Pajak Kendaraan Bermotor"